

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN TELUK BAYUR KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU

Indah Grafika Devani¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur dan faktor pendukung dan penghambat dalam menyukseskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Metode dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian yang ditetapkan adalah pemberdayaan di bidang lingkungan, pemberdayaan di bidang sosial, serta pemberdayaan di bidang ekonomi Dan Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menyukseskan gerakan PNPM Mandiri khususnya di perdesaan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder, sedangkan sumber data yang diambil dari informen yang kompeten, diantaranya yaitu Ketua PNPM Mandiri Kelurahan Teluk Bayur dengan Fasilitator PNPM Kelurahan Teluk Bayur dengan dan beberapa masyarakat yang sedang melakukan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum selama pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik dikarenakan sebagian warga sudah memahami visi dan misi dari PNPM Mandiri dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju terciptanya tujuan pembangunan nasional. Masyarakat telah diarahkan dan diberi pembekalan oleh pejabat terkait mengenai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk kepentingan bersama, sehingga mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan partisipasi dunia usaha.

Kata Kunci : Implementasi, Program , Pemberdayaan Masyarakat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email :

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan untuk kemajuan bangsa serta rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut dapat dipacu untuk mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan hingga pedesaan diseluruh Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut adalah meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran hendaknya dapat menjadi semangat dan pendorong Negara Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang salah satunya Negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial, oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mengatasi kemiskinan sangat dibutuhkan suatu solusi yaitu mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan pembangunan yang dapat dirasakan disetiap daerah di Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri) sejak tahun 2007.

Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah bagi penulis sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya .

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dan instansi terkait dalam menyelesaikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Implementasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Implementasi adalah sebagai penerapan, penerapan disini memiliki dua arti, yaitu:

- a. Sebagai pelaksana dari peraturan yang telah ada kedalam tindakan dilapangan oleh para pelaksananya.
- b. Implementasi dapat pula berarti suatu usaha untuk menyesuaikan suatu peraturan yang berlaku atau peraturan yang baru itu sebagai acuan bagi peraturan yang akan datang.

Implementasi didalam revisi kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 2002:64) disebutkan bahwa implementasi dirumuskan secara pendek, dimana mengimplementasikan (*to implementasi*) berarti menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu. (*to provide means for carrying out, to give practical effect to*).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*).

Kemudian, menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, rencana, teknologi, (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan), (c) dari aspek keluaran dan *output* (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan yang melanda daerah pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau masyarakat lainnya. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri. Prinsip-prinsip itu meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola tanpa intervensi negative dari luar.
3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
8. Transparansi dan akuntabel. Pengertian transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
10. Kolaborasi. Pengertian prinsip kolaborasi adalah semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
11. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan pembangunan dan pelestarian pembangunan.

Mengembangkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan dan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.

Sasaran PNPM Mandiri

Lokasi Sasaran:

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Kelompok Sasaran:

- a. Masyarakat Miskin di pedesaan,
- b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan,
- c. Kelembagaan pemerintah lokal

Keluaran program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di suatu daerah yang bersangkutan.
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah kecamatan dan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri bagi masyarakat.
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
6. Terbentuk dan berkembangnya peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat diwilayahnya. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat.

Definisi Konsepsional

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan wujud nyata pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui program yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan-kegiatan dibidang ruang lingkup aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah

instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. *Library Research* (Penelitian Keperustakaan)
Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.
2. *Field work Research* (penelitian lapangan)
Pengumpulan data secara langsung kepada subjek atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik atau cara antara lain:
 - a. Observasi (pengamatan langsung)
Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung didalam memilih, mengubah, mencatat dan memberikan kode terhadap serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan subjek atau objek yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang berkaitan dengan PNPM Mandiri.
 - b. Wawancara
Cara untuk memperoleh informasi melalui proses tanya jawab secara langsung kepada kepada pihak responden. Wawancara dilakukan kepada Ketua PNPM Mandiri Kelurahan teluk Bayur beserta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum.
 - c. Dokumentasi
Dalam pengumpulan data mengenai Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan ini peneliti berusaha mengumpulkan, mempelajari berbagai dokumen dan data-data yang berkaitan dengan Implementasi PNPM Mandiri perdesaan.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dari Marthew B Milles dan A. Michael Huberman (2004 : 19) yang meliputi empat komponen.

Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis model interaktif yaitu

- a. Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- b. Penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Alasan mendasar dilakukan tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang padu untuk memahami fenomena yang ada dibandingkan dengan teori yang perlu dipahami dalam langkah ini juga merupakan kegiatan reduksi data.

- c. Reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan perusahaan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- d. Menarik Kesimpulan / Verifikasi, adalah proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat dan proposi penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, yaitu Pemberdayaan dibidang lingkungan, pemberdayaan dibidang sosial dan pemberdayaan dibidang ekonomi.

1. *Pemberdayaan dibidang Lingkungan*

Pembangunan aspek lingkungan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Proses pelaksanaan PNPM Mandiri pada aspek lingkungan yang pertama adalah sosialisasi awal. Masyarakat dikenalkan dan diajak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Pihak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PNPM Mandiri kemudian membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan perwakilan dari RT. Mereka dibentuk untuk mengelola dan mengusulkan rencana pembangunan lingkungan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Selanjutnya dilaksanakannya musyawarah bersama-sama untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan pada aspek lingkungan dengan melihat segala permasalahan yang ada di setiap lingkungan. Musyawarah masyarakat merupakan menyusun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah berdasarkan visi misi bersama, serta membahas potensi sumber pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah bersama-sama menyepakati prioritas pembangunan yang akan dilakukan maka pelaksanaan kegiatan akan segera dilakukan.

Aspek lingkungan bertujuan meningkatkan kapasitas pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari dan indah. Dalam membangun lingkungan yang lestari dibutuhkan adanya peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pada aspek lingkungan. Peranan masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan lingkungan. Program yang dilakukan PNPM-Mandiri di bidang lingkungan yaitu berupa sarana dan prasarana umum.

2. *Pemberdayaan dibidang Sosial*

Pemberdayaan PNPM Mandiri pada aspek sosial di Kelurahan Teluk Bayur berupa bantuan Beasiswa untuk anak kurang mampu dalam pendidikan. Para RT akan mendata warganya yang tidak mampu dan masih harus melakukan wajib belajar. Selain itu adanya bantuan sembako kepada keluarga miskin dalam jangka waktu satu tahun sekali, dimana dananya berasal dari laba. Masyarakat Kelurahan

Teluk Bayur memerlukan bantuan PNPM Mandiri berupa Beasiswa Pendidikan dan bantuan sembako untuk keluarga miskin dan pengangguran. Adanya PNPM Mandiri pada aspek sosial ini sangat membantu meringankan beban yang diraskan warga didalam memenuhi kebutuhan hidup, misalnya anak yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolah mereka dan juga kebutuhan sembako dapat terpenuhi walaupun untuk kegiatan sembako diadakan setahun sekali.

3. *Pemberdayaan dibidang Ekonomi*

PNPM berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan bentuk kegiatan PNPM Mandiri pada aspek ekonomi adalah dana bergulir. Dana bergulir merupakan dana pinjaman kepada masyarakat miskin guna mengurangi tingkat pengangguran di Kelurahan Teluk Bayur. PNPM Mandiri pada aspek ekonomi di Kelurahan Teluk Bayur sudah cukup memberikan suatu jalan keluar masalah ekonomi kepada warga untuk belajar mandiri dalam membuka peluang usaha rumah tangga demi mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kelurahan tersebut.

Pemberdayaan di bidang ekonomi sangatlah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi kemasyarakatan dan untuk mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan usaha strategi masyarakat, untuk mewujudkan pemberdayaan di bidang ekonomi maka strategi yang digunakan adalah PNPM Mandiri untuk Kelurahan Teluk Bayur adalah penambahan modal kepada masyarakat melalui pinjaman bergulir.

4. *Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan baik melalui observasi,wawancara dan pengamatan secara langsung dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor pendukung dalam Implementasi PNPM MANDiri Perdesaan di Kelurahan Teluk Bayur selama ini sudah cukup berjalan dengan baik karena disertai dengan partisipasi warga. Keberhasilan dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah partisipasi masyarakatnya sendiri karena program ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat, maka partisipasi aktif dari masyarakat yang dibutuhkan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga mengelola dan memelihara kegiatan fisik dan non fisik tersebut.

Dan faktor penghambat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat telah menunjukkan hasil yang maksimal namun partisipasi dari beberapa Ketua RT yang terhambatnya pelaksanaan PNPM Mandiri ini. Dari beberapa Ketua RT yang tidak hadir dalam rembung warga sehingga warga maupun Ketua RT tersebut tidak pernah mendapatkan dana pancingan dari PNPM Mandiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara yang telah dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian menunjukkan bahwa terwujudnya Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan di bidang lingkungan adalah berupa perbaikan fasilitas umum dan pembuatan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan warga sehingga pemberdayaan dibidang lingkungan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa lingkungan Kelurahan Teluk Bayur telah mengalami kemajuan yang baik dari sebelumnya dimana sebelumnya beberapa lingkungan di Kelurahan Teluk Bayur cukup tidak diperhatikan dan lambat laun akan menimbulkan keprihatinan.
2. Pemberdayaan di bidang sosial adalah bantuan Beasiswa untuk anak yang tidak mampu dan bantuan lain berupa sembako yang dananya berasal dari laba program pinjaman warga.
3. Pemberdayaan dibidang ekonomi adalah pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin. Peminjaman ini dilakukan untuk penambahan modal mereka dan secara keseluruhan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik karena dana tersebut digunakan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai berikut :
 1. Faktor-faktor pendukung sebagai berikut :
 - a. Partisipasi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dalam membuat usulan kegiatan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan utama PNPM Mandiri yaitu memandirikan masyarakat dalam menggali potensi yang ada diwilayahnya
 - b. Keterlibatan pemerintahan dalam segi pendanaan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang memudahkan masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
 2. Faktor-faktor Penghambat sebagai berikut :
 - a. Sebagian Ketua RT sebagai relawan untuk warganya tidak berpartisipasi, dikarenakan sebagian Ketua RT beranggapan program PNPM Mandiri ini berbelit-belit sehingga mereka enggan berpartisipasi, padahal untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Teluk Bayur dibutuhkan partisipasi dari masyarakat terutama Ketua RT untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.
 - b. Masih ada segelintir warga akan kurangnya kesadaran masyarakat peminjam dana bergulir dalam menengembalikan dana angsuran tepat waktu sehingga menghambat jalannya program pinjaman dan bergulir berikutnya. Selain itu tidak dapatnya tepenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dikarenakan keterbatasan dana.

Saran

Setelah melalui beberapa tahap-tahap penelitian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya partisipasi masyarakat terutama Ketua RT sebagai relawan PNPM Mandiri untuk mendukung kegiatan PNPM Mandiri, agar masyarakat diharapkan dapat bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat.
2. Perlunya pelaksanaan sosialisai secara rutin kepada masyarakat tentang pentingnya PNPM Mandiri, dimana memberikan informasi dan penjelasan mengenai manfaat PNPM Mandiri dan memberikan dana bantuan kepada relawan agar dapat menarik dan mengajak untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri.

Daftar Pustaka

- Bayo, Andre, Drs. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit LIBERTY, Yogyakarta.
- Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Krbijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplkasinya*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawjaya, Malang.
- Koryati; Nyimas Dwi; Hidayat, Wisnu; dan Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Anderson. 1979. *Policy Implementation of Administrative*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Anderson. 1999. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Lubis, M. Solly. 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju
- Sumardi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Supardi, Suparlan. 2005. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi.2006, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo
- Widodo, Joko, M.Sc, Dr. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing, Malang.

- Matthew, B. Miles dan Huberman, Penterjemah Rohindi, Rohendi Tjejep. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penerbit UI
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Remi, 2002. Sutastie Soemito & Tjiptorijanto, Priyono; Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono, Sunyoto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Dokumen-Dokumen :

- Pedoman PNPM Mandiri . *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*.
(Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*

Sumber Internet:

<http://www.pnpm-mandiri.orgmagnesstoricspendumpnpm.pdf>